

**PERANAN KEPALA DINAS KESEHATAN
DALAM PENGAWASAN PROGRAM JAMKESMAS
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Oleh:

SERMI TIDORE

Email: sermy.tidore@yahoo.com

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Drs. P. Rumapea, M.S

2. Dra. Ogotan Martha, M.Si

ABSTRACT

Efforts to improve the implementation of the program has been carried out by the government JAMKESNAS, but still there are problems or irregularities implementation of health services to participants in both health card and Hospital Health Center. This was caused partly by a lack of oversight of the implementation of the program at the hospital or health center .. Based on this conceptual background, this study was conducted to determine the extent to which the role of the health department in the monitoring program in North Halmahera JAMKESMAS.

The method used in this study is a qualitative method. The focus of this research is the head of health supervision in the implementation of a health card services in hospitals and health centers. Source of data / key informants in the study were taken from various elements associated with the implementation of the existing health card program in the health department, hospitals, health centers, and PT.ASKES; than that taken from the participants JAMKESNAS informants to determine service delivery in health centers and hospitals. The total number of data sources / informants, there were 14 people. The main instrument of this study is the researchers themselves, while the technique of data collection was interviews. The analysis technique used is the qualitative analysis of interactive models and Hubermann Miler.

The results lead to the conclusion that in general health services in the District of North Halmahera in katakana yet effective due to the current resource (Doctor), respectively in hospitals and even health centers is still low: conclusions based on research indicators, namely: (1) The role of the head of health in direct supervision method jamkesmas program can be conducted in accordance with both the position and authority as a responsible team manager and secretary jamkesmas jamkesmas district coordination team, (2) the role of head of the health card program oversight through monitoring method does not lanagsung (coordination and reporting system) in hospitals and health centers of North Halmahera regency has been implemented effectively.

Departing from the results of this penellian then suggested: (1) the role of the health card program oversight through direct supervision method needs to be done by the head of North Halmahera district health offices. (2) the role of head of department in the supervision of a health card program through the method of indirect supervision (coordination and reporting system) needs to be improved.

Keywords: monitoring, health card program, health services.

Peran pemimpin dalam pengawasan di suatu organisasi sangat penting demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dimana pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan/manager untuk mengetahui bahwa pelaksanaan/hasil kerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan akan ditanggulangi. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada, agar dapat diperbaiki bahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan Jamkesmas ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terutama Kepala Dinas Kesehatan terus melakukan upaya perbaikan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang di pertegas oleh Stoner dan Wankel (1996), bahwa pengawasan (*controlling*) adalah proses melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Lanjut dikatakan, proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. Menurut Terry (1994) bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu : (1) mengukur hasil pekerjaan, dengan cara observasi secara pribadi, laporan-laporan tertulis, dan laporan-laporan lisan; (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan apabila ada perbedaan, dan (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dengan kata lain menurut Terry (1994) bahwa pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan: (1) mencari informasi/keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan, (2) membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan, dan (3) menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan tindakan-tindakan perbaikan.

Walaupun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Terutama Kepala Dinas Kesehatan, akan tetapi masalah pelayanan kesehatan masih saja nampak, bahkan untuk meningkatkan pelayanan Jamkesmas, masih dapat ditemukan fakta yang menunjukkan implementasi program ini di lapangan atau pada tingkat operasional masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari masih

adanya keluhan masyarakat peserta Jamkesmas tentang pelayanan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah penyelenggara program Jamkesmas. Pasien (masyarakat) pemegang kartu peserta Jamkesmas masih sering dipersulit dalam memperoleh pelayanan atau sering mendapatkan pelayanan yang tidak maksimal, seperti ditolak untuk pengobatan rawat inap dengan alasan tidak ada tempat, masih dibebankan biaya-biaya tertentu yang tidak jelas, membayar obat-obatan. Prosedur pelayanan juga dirasakan masih rumit dan berbelit-belit, dan persyaratan teknis administratif yang masih memberatkan masyarakat. Petugas Rumah Sakit atau Puskesmas juga seringkali bersikap kurang baik dalam memberikan pelayanan seperti seolah-olah tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu tentang program Jamkesmas ini, sehingga pelayanan terhadap peserta/pengguna Jamkesmas diperlakukan sebagaimana pasien lainnya yang bukan masyarakat miskin, maka dengan itu bagaimana melihat pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa terlepas dari keluhan masyarakat yang ada di kabupaten Halmahera Utara. karena berbagai kelemahan ataupun penyimpangan dalam implementasi program Jamkesmas tersebut dapat disebabkan antara lain oleh kurangnya atau lemahnya pengawasan dari instansi atau pejabat terkait yang berwenang.

Dengan bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang "Peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Program Jamkesmas Di Kabupaten Halmahera Utara".

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bungin (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Miskin Di Kabupaten Halmahera Utara. Fokus penelitian didefinisikan sebagai aktivitas pemimpin untuk melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap hasil pelaksanaan tugas pekerjaan agar benar-benar sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan

sebelumnya dengan melihat beberapa indikator permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Jenis data penelitian yang digunakan untuk dianalisis yaitu jenis data primer. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode/teknik wawancara, pengamatan, dan pengumpulan data sekunder.

Cara analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melihat Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan program Jamkesmas Di Kabupaten Halmahera Utara. Oleh sebab itu untuk menjawab permasalahan penelitian, maka telah dilakukan pengumpulan data dengan melakukan teknik-teknik wawancara dan observasi lapangan.

Hasil wawancara dengan para informan baik dengan pejabat terkait dengan program jamkesmas maupun dengan masyarakat peserta jamkesmas di atas dapat dibuat rangkuman sesuai dengan indikator-indikator atau aspek-aspek untuk melihat atau menilai peran Kepala Dinas dalam program jamkesmas di kabupaten Halmahera Utara. Dengan menganalisis hasil tersebut dapat diketahui apakah Kepala Dinas menerapkan metode pengawasan baik secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung.

Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan program jamkesmas belum banyak dilakukan dengan metode pengawasan langsung seperti inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan di tempat. Semua informan pejabat terkait yang diwawancarai mengatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan sangat jarang melakukan inspeksi langsung atau observasi langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas di fasilitas kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit), tetapi lebih banyak ditugaskan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten. Semua informan pejabat terkait yang diwawancarai juga mengemukakan, Kepala Dinas Kesehatan sangat jarang melakukan pengecekan langsung kebenaran laporan pelaksanaan pelayanan jamkesmas yang disampaikan oleh Puskesmas atau rumah sakit atau oleh bawahan yang terkait, tetapi

biasanya itu dilakukan pada rapat koordinasi tim pengelola jamkesmas kabupaten. Semua informan pejabat terkait yang diwawancarai juga mengemukakan, Kepala Dinas Kesehatan tidak pernah melakukan dialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan jamkesmas di Puskesmas dan rumah sakit, tetapi melalui laporan bawahan yang terkait; Semua informan masyarakat peserta jamkesmas yang diwawancarai juga mengemukakan tidak pernah melihat atau mendengar Kepala Dinas melakukan dialog dengan para peserta atau keluarga peserta jamkesmas tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit.

Pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas pada semua fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit) sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Semua informan pejabat/petugas terkait yang diwawancarai mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Puskesmas dan RSUD) sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis program jamkesmas yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Menurut semua informan masyarakat peserta jamkesmas yang diwawancarai bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas lancar, tidak mempersulit, tidak dipungut biaya, dan memuaskan; pelayanan di RSUD menurut semua informan tersebut juga sudah baik dan lancar, namun persyaratan administrasi dan prosedur pelayanannya masih dirasakan lebih berat dan lebih rumit jika dibandingkan dengan pelayanan di Puskesmas.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut (Fayol,1949). Pengawasan Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Dengan pengawasan ini maka yang mengawasi dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk atau instruksi yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan. Pengawasan tidak langsung memiliki pengertian pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain dilakukan dari

belakang meja dengan menganalisa dan mempelajari segala dokumen yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan (Siagian dalam Sujamto :1986).

Sesuai dengan pengertian tersebut diatas, maka hasil pengumpulan data sesuai indikator-indikator yang meliputi yakni pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, berikut hasil analisis peneliti dengan menyesuaikan dari beberapa teori yang bersangkutan dengan indikator penelitian ini, yakni:

1. Pengawasan secara langsung, pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan dan penerapan sistem pelaporan kegiatan program jamkesmas pada semua instansi/unit kerja terkait di Halmahera Utara, hal itu sesuai dengan hasil penelitian bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara telah dapat melakukan dengan baik peranan pengawasan preventif dan represif terhadap program jamkesmas. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan preventif dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan terhindar dari penyimpangan; sementara itu pengawasan represif dimaksudkan untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan program Jamkesmas, kepala dinas kesehatan sebagai penanggung jawab pengelolaan jamkesmas kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan jamkesmas terutama terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit).

Senada dengan teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan koordinasi Kepala Dinas Kesehatan terhadap program jamkesmas di Kabupaten Halmahera Utara sudah dapat dilaksanakan dengan baik melalui penerapan sistem pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit). Semua Puskesmas dan rumah sakit penyelenggara pelayanan jamkesmas wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas melalui tim pengelola kabupaten.

Selain itu melalui rapat koordinasi, Kepala Dinas selaku penanggung jawab tim pengelola jamkesmas kabupaten meminta laporan dan keterangan lisan kepada pihak Puskesmas dan rumah sakit tentang pelaksanaan dan berbagai

masalah atau kendala di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas, sekaligus mengecek kebenaran laporan tertulis yang telah disampaikan.

2. Pengawasan tidak langsung bahwa pengawasan tersebut dapat dilakukan lebih efektif oleh kepala dinas kesehatan terhadap pelayanan kesehatan kepada peserta jamkesmas pada fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) maka dapat dipastikan pelaksanaan program jamkesmas akan lebih efektif (Siagian, 2000). yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka di atas dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen; artinya bahwa pengawasan merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin/pimpinan dalam sebuah organisasi. Pengawasan adalah suatu aktivitas atau tindakan pihak manajemen/pimpinan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Pengawasan dapat bersifat preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan; dan dapat pula bersifat represif yaitu dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan (Hasibuan, 1996). Fungsi pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemimpin/pimpinan melalui metode pengawasan langsung (inspeksi langsung, observasi ditempat, laporan ditempat), maupun secara tidak langsung seperti melalui penciptaan koordinasi pelaksanaan dan sistem pelaporan tertulis dan lisan (Siagian, 2000).

Dengan melandaskan teori di atas kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan program jamkesmas sudah dapat dilakukan dengan baik di Kabupaten Halmahera Utara dengan metode atau teknik pengawasan tidak langsung yaitu melalui pengkoordinasian terhadap instansi/unit kerja atau unsur

yang terkait, dan melalui penerapan sistem pelaporan pelaksanaan jamkesmas pada fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit).

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa pada umumnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara belum dikatakan efektif karena sampai sekarang ini sumberdaya yakni (Dokter) masing-masing di RSUD bahkan puskesmas masih minim.

Sesuai dengan indikator penelitian ini, peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan program jamkesmas baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Halmahera Utara yang sebagaimana dilihat dari kedua aspek tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengawasan secara langsung dimana peran Kepala Dinas Kesehatan sesuai kedudukan dan kewenangannya selaku penanggung jawab tim pengelola jamkesmas dan sekretaris tim koordinasi terhadap pengawasan yang dilakukan (seperti : Inspeksi langsung, observasi dan laporan tentang program jamkesmas) di Rumah sakit maupun di Puskesmas yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan efektif. Pengawasan secara tidak langsung yang bagaimana peranan Kepala Dinas dalam mengkordinasikan program jamkesmas pada semua instansi/unsur terkait dan melalui penerapan sistem pelaporan tertulis pelaksanaan program jamkesmas oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas) di Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan saran secara umum kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara agar lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Adapun di rekomendasikan saran kepada pihak terkait dengan program Jamkesmas di Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan indikator pengawasan secara langsung

dan pengawasan tidak langsung, yaitu sebagai berikut:

Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan secara langsung terhadap program jamkesmas lebih ditingkatkan untuk lebih dioptimalkan, maka perlu pengawasan secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara.

Peranan Kepala Dinas Kesehatan dalam pengawasan tidak langsung yaitu dengan mengkoordinasikan pelaksanaan pada semua instansi/unsur terkait dan melalui penerapan sistem pelaporan tertulis pelaksanaan program jamkesmas oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) di Halmahera Utara perlu ditingkatkan agar lebih dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hasibuan, M. 1996, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S.P., 2000, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Stoner, L.J. dan C. Wankel, 1996, *Manajemen* (terjemahan), Jakarta, Intermedia.
- Terry, G.R., 1994, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumni.